

## BAB II

### MADRASAH, SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

#### A. Sejarah Madrasah pada masa Islam Klasik

Pendidikan Islam telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah, sebelum hijrah pendidikan Islam fokus pada akidah sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan mengubah keyakinan dan pola pikir masyarakat yang semula memertuhankan benda-benda yang tidak berdaya menjadi orang yang meyakini adanya Allah SWT dan akhlak mulia. Tempat pendidikan awal Islam di rumah Arqam bin Abi al-Arqam dalam *halaqah*, tempat yang lain di sekitar Masjidil Haram. Setelah hijrah, Pendidikan Islam di Madinah berpusat di Masjid Quba, al-suffah, Kuttab.<sup>1</sup> Kurikulum yang digunakan yaitu al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara berangsur-angsur.<sup>2</sup> Pendidikan Islam membentuk persaudaraan masyarakat (*ukhuwah*) dan ekonomi serta penerapannya dalam kehidupan.

Pada masa khulafaur rasyidin, pendidikan Islam berpusat dikota antara lain: Mekkah, Madinah, Basrah, Kuffah, Damsyik, dan Mesir. Pada masa khalifah Abu Bakar pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, lebih meningkat dimana guru-guru diangkat dan digaji untuk mengajar ke daerah-daerah yang

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 77-98.

<sup>2</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, hlm. 40.

baru ditaklukkan. Pada masa khalifah Usman bin Affan, pendidikan Islam diserahkan kepada rakyat dan sahabat diperbolehkan ke daerah-daerah untuk mengajar. Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, pendidikan Islam kurang mendapat perhatian ini disebabkan pemerintahan Ali selalu dilanda konflik yang berujung kepada kekacauan.<sup>3</sup> Sehingga pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan.

Pada masa Bani Umayyah yang berkuasa selama 91 tahun (661-750M) pendidikan Islam lebih berkembang dibandingkan masa khulafaur rasyidin. Perkembangan tersebut yang paling menonjol pada aspek kelembagaan telah muncul pendidikan baru, yakni istana, *badiah* (dusun Badui di Padang Sahara/program Arabisasi), perpustakaan, dan *bimaristan* (rumah sakit pendidikan). Adapun ilmu yang diajarkan bukan hanya bidang agama saja, melainkan juga ilmu-ilmu umum. Namun demikian, ilmu-ilmu agama masih lebih dominan dibandingkan ilmu umum.<sup>4</sup> Situasi politik, sosial, keagamaan masa Bani Umayyah belum sepenuhnya mendukung kegiatan pendidikan karena terus melakukan perluasan wilayah dan meredam pemberontakan.

Sistem pendidikan Islam, masa Bani Abbasiyah tampak lebih maju, lengkap dan kukuh. Hal ini sejalan dengan puncak keemasan Islam (*Golden Age*) di zaman itu diantaranya madrasah, berbagai lembaga pendidikan, tradisi ilmiah akademik yang amat kondusif, kurikulum pendidikan, para guru

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>4</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 142-143.

yang memiliki bidang keahlian, reputasi dan pengaruhnya yang luas tidak hanya bagi umat Islam melainkan juga bagi dunia.<sup>5</sup>

Madrasah sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan fenomena berdirinya madrasah Nizamiyah di bawah kekuasaan Nizamul Muluk seorang perdana menteri Dinasti Saljuk pada tahun 1067 M di Baghdad perguruan tinggi modern (yang kelak menjadi tipikal *college* di Eropa).<sup>6</sup> Memang pada dasarnya jauh sebelum Madrasah Nizamiyah, di daerah Nissapur sudah berdiri madrasah sebagaimana dilaporkan oleh Richard W. Bulliet dalam *The Patricians of Nissaphur*. Tetapi bila dilihat dari kurikulum dan administrasinya madrasah tersebut belum seperti Madrasah Nizamiyah.<sup>7</sup> Dinasti Fatimiyah di bawah khalifah al-Mu'iz membangun perguruan tinggi Al-Azhar di Mesir tahun 972 M yang tetap eksis sampai sekarang. Pendirian Al-Azhar misalnya tidak lepas dari upaya propaganda doktrin Syi'ah yang merupakan legitimasi bagi pemerintahan Fathimiyah. Begitu pula, madrasah Nizamiyah merupakan benteng ortodoks Sunni dalam menghadang doktrin Syi'ah di al-Azhar yang dilancarkan oleh dinasti Fatimiyah.<sup>8</sup>

Pada madrasah Nizamiyah, Menurut Ahmad Syalabi, perkembangan dari masjid ke madrasah terjadi secara langsung tidak memakai lembaga perantara. Sedangkan George Makdisi menjelaskan teori bahwa transformasi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>6</sup> Musnur Heri, *Sejarah Pendidikan Islam (Edisi Revisi)*, hlm. 52.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

lembaga pendidikan Islam dari masjid ke madrasah terjadi melalui tahapan perantara: tahap masjid, tahap masjid-*khan* (masjid yang dilengkapi dengan asrama, pemondokan) dan tahap madrasah.<sup>9</sup> Masjid dan Masjid *Khan* betapapun besar peranannya, tetapi merupakan tempat ibadah sehingga tidak kondusif untuk belajar dan aktivitas pendidikan yang merusak ketenangan ibadah maka pendirian madrasah adalah solusi yang tepat. Fasilitas madrasah lebih terjamin, wakafnya menyediakan seluruh kebutuhan pokok mahasiswa dalam belajar. Madrasah bebas dari sistem kontrol penguasa-penguasa (khalifah, sultan, amir dan sebagainya), kontrol atas kegiatan sepenuhnya berada dalam tangan pemberi wakaf. Madrasah Nizhamiyah misalnya sebagai upaya Nizham al-Mulk untuk menghindari campur tangan khalifah.<sup>10</sup>

Kurikulum madrasah yang lahir pada abad ke-5 H/11 M ditekankan pada pelajaran fiqh, bahkan terkadang dikhususkan untuk mazhab tertentu. Madrasah Nizamiyah misalnya, berdasarkan piagam wakafnya dikhususkan untuk pengajaran mazhab Syafi'i (dimana fiqh merupakan bidang studi utama atau lembaga pendidikan hukum *College of Law*).<sup>11</sup> dan Madrasah Abu Hanifah yang dibangun pada waktu yang sama di Baghdad, khusus untuk mazhab Abu Hanifah.

---

<sup>9</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 57

<sup>10</sup> Musnur Heri, *Sejarah Pendidikan Islam (Edisi Revisi)*, hlm. 79.

<sup>11</sup> Nor Huda, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, hlm. 315.

Dalam perkembangan berikutnya madrasah tidak hanya sebagai *Fiqh Institution* tetapi juga sebagai tempat khusus bagi studi lain. Abdul Malik al-Muazzham Syaraf al-Din dari Dinasti Ayyubiyah membangun madrasah khusus untuk ilmu-ilmu bahasa Arab pada tahun 605 H/ 1223 M. Dan menurut laporan al-Nuaimy pada abad ke-7 H di Damaskus berdiri madrasah-madrasah yang mengajar kedokteran seperti Madrasah al-Dikhlawiyah, al-Dunaisyiriah, dan al-Labudiyah.<sup>12</sup>

Latar belakang sejarah pendidikan Islam Klasik yang demikian itu, sangat dipengaruhi oleh arus pemikiran dan kepentingan politik yang menentukan bentuk pendidikan madrasah dan perkembangan corak ilmu pengetahuan Islam didalamnya. Pada perkembangannya madrasah sebagai perguruan tinggi atau institusi pendidikan yang mengarah pada aliran mazhab dan bidang-bidang keilmuan tertentu.

## **B. Sejarah dan Perkembangan Madrasah di Indonesia**

Sebelum kemerdekaan Indonesia, bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk berdagang, tetapi karena kekayaan alam Nusantara yang sangat banyak maka tujuan utama berdagang berubah menjadi untuk menguasai wilayah Nusantara dan mengembangkan pahamnya yang terkenal dengan semboyan 3G yaitu, *Glory* (kemenangan dan kekuasaan), *Gold* (emas

---

<sup>12</sup> Musnur Heri, *Sejarah Pendidikan Islam (Edisi Revisi)*, hlm. 80.

atau kekayaan), dan *Gospel* (upaya salibisasi terhadap umat Islam di Indonesia). Dalam menyebarkan misi-misinya itu, Belanda (VOC) mendirikan sekolah kristen. Misalnya di Ambon yang jumlah sekolahnya mencapai 18 Sekolah, di Batavia sekitar 20 Sekolah.<sup>13</sup>

Kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam bersifat diskriminatif baik secara sosial, ras, anggaran, maupun kepemelukan terhadap agama sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Membedakan sekolah yang diperuntukkan khusus untuk kaum bangsawan (*Hoofdenschool*) dengan sekolah untuk orang-orang terhormat bumi putra yaitu sekolah angka satu (*de Schoolen de Eerste Klasse*), untuk rakyat pribumi sekolah kelas dua (*de Schoolen de Tweede Klasse*) atau istilahnya sekolah ongko loro.
- b. Sekolah dibedakan menurut ras dan keturunan seperti *Europeeche Lagere School* (ELS) untuk anak-anak Eropa, *Hollandsh Chinese School* (HCS) untuk anak-anak Cina dan keturunan Asia Timur, *Holandsch School* disebut sekolah bumiputra dari kalangan ningrat, dan *Inlandsch School* yang disediakan untuk anak-anak pribumi pada umumnya.
- c. Diskriminasi anggaran terlihat pemberian anggaran yang lebih besar untuk sekolah anak-anak Eropa, padahal jumlah siswa pada sekolah bumiputra jauh lebih banyak.

---

<sup>13</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, hlm. 291-292.

<sup>14</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 284.

- d. Kebijakan pemerintah Belanda cenderung memperhatikan wilayah penduduknya beragama Kristen, sedangkan pesantren yang menjadi basis pendidikan agama bagi masyarakat Muslim tidak mendapat perhatian bahkan cenderung dimusuhi.

Selanjutnya, Belanda juga menerapkan pengawasan dan kontrol yang sangat ketat dan kaku terhadap pendidikan untuk menghambat menghalangi, pelaksanaan pendidikan Islam. Menerapkan prinsip yang memaksa sekolah berorientasi ke Barat sebagai alat untuk *misionaris* Kristen, Pemerintah Belanda juga mempekerjakan tamatan sekolah tetapi pekerja pribumi hanyalah rendahan atau pegawai kasar seperti jongos, tukang kebersihan, tukang kebun, yang harus mengabdikan pada tuannya.<sup>15</sup> Dengan kebijakan tersebut, mereka tidak ingin masyarakat pribumi dan umat Islam menjadi cerdas dan pandai karena dikhawatirkan akan mengancam kekuasaan dan kelangsungan perdagangan mereka.

Madrasah di Indonesia berbeda dengan madrasah-madrasah yang berkembang di Timur Tengah, kondisi pendidikan Islam terus mendapat tekanan dan perlakuan yang tidak baik, namun demikian umat Islam tetap berjuang dan melakukan perlawanan. Latar belakang munculnya lembaga pendidikan Islam, menurut Maksum, setidaknya dapat dikembalikan kepada dua situasi, yaitu: (1) adanya gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan (2)

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.284.

adanya respons pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda.<sup>16</sup> Karel A. Steenbrink mengidentifikasi empat faktor pendorong gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu: (1) faktor keinginan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah; (2) faktor semangat nasionalisme melawan penguasa kolonial belanda; (3) faktor memperkuat basis gerakan sosial ekonomi budaya dan politik; (4) faktor untuk melakukan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.<sup>17</sup>

Pertumbuhan madrasah di Indonesia merupakan usaha penyesuaian atas tradisi persekolahan mengingat struktur dan mekanismenya yang hampir sama. Madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah yang hanya diberi muatan dan corak keislaman.<sup>18</sup>

Di permulaan abad ke-20 banyaklah pulang ke Tanah Air para pelajar yang telah bermukim bertahun-tahun di Timur Tengah. Sekembalinya mereka ke Indonesia mereka kembangkanlah ide-ide baru dalam bidang pendidikan. Salah satu diantaranya ialah madrasah. Antara lain Syekh Abdullah Ahmad, pendiri Madrasah Adabiyah di Padang pada tahun 1909, Syekh M. Thaib Umar mendirikan Madrasah *School* di Batu Sangkar tahun 1910. Di kalangan organisasi Islam melaksanakan pembaharuan dalam bidang pendidikan, tercatat diantaranya yang termasyhur adalah Muhammadiyah didirikan di

---

<sup>16</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, hlm. 82.

<sup>17</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam kurun modern*, hlm. 26-28.

<sup>18</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, hlm. 81.

Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Al-Irsyad di Jakarta pada tahun 1913. Nahdatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari.<sup>19</sup> Oleh karena itu, kemunculan madrasah terinspirasi dari gerakan pembaharuan Islam yang dimulai oleh sejumlah tokoh intelektual agama Islam dan selanjutnya dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam.

Setelah Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia, kedatangan Jepang cenderung untuk tujuan politik yaitu mendapatkan dukungan sumber daya manusia (tentara) dan logistik yang mereka perlukan untuk kemenangan perang Asia Timur Raya. Pemerintahan Jepang mempunyai kebijakan yang dinilai menguntungkan khususnya bagi umat Islam sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Jepang mendirikan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama Tingkat Provinsi/Kanwil Agama), *Shumuka* (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat/Departemen Agama) selain itu Jepang memberikan perhatian dan kebebasan bagi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agama dan mengurus masalah keagamaan. Keadaan ini menjadi daya tarik terhadap pemerintah Jepang.
- b. Mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) sebagai pengganti Majelis Syuro Islam Indonesia (Masyumi) berfungsi sebagai tempat bagi umat Islam untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, dan

---

<sup>19</sup> Haidar Putra Daulany, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 98-101.

<sup>20</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 304-305

aspirasi politiknya.

- c. Mendirikan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
- d. Memperkenalkan cara menggunakan senjata modern kepada umat Islam, melalui pembentukan kesatuan tentara Hizbullah (Tentara Allah) dan PETA (Pembela Tanah Air).
- e. Jepang mengadakan perubahan dalam pendidikan, diantaranya menghapuskan *dualisme* pengajaran. *Hakku Ichiu*, dilatih kemiliteran. *Kokumin Gakkoo*, sekolah rendah yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, ialah sekolah rakyat enam tahun.<sup>21</sup> Masa Jepang, pendidikan agama Islam ditangani secara khusus. Pemerintah Jepang membuat relasi-positif dengan kiai dan ustadz.

Namun demikian, keadaan tersebut hanyalah taktik tipuan belaka. Jepang menunjukkan sikap penjajah akibat kekalahan dalam perang, dan menuntut rakyat Indonesia untuk patuh pada pemerintahnya antara lain; menghormati Kaisar Jepang setiap pagi dengan menyembah matahari, setiap anak sekolah harus menyanyikan lagu *Kimigayo* membungkukkan badan ke arah matahari, menerapkan kebijakan tanam paksa atau kerja rodi jika tidak mematuhi akan dihukum bahkan sampai mati, memaksa kaum wanita menjadi budak pemuas nafsu.<sup>22</sup> Keadaan tersebut berakhir ketika Jepang pulang ke

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Rekontruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 60.

<sup>22</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 306-307.

negerinya saat Hiroshima dan Nagasaki di Bom Atom oleh Amerika.

Keadaan sistem pendidikan Islam di zaman Jepang masih sama dengan keadaan di zaman Belanda, perbedaannya pendidikan Islam di zaman Jepang jauh lebih leluasa dalam kiprahnya. Di samping mendatangkan berbagai hal yang merugikan umat Islam, Jepang memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan militer.

Madrasah di Indonesia dapat dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau. Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat, yang sudah berurat akar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntutan dan bantuan materil dan pemerintah karena lembaga pendidikan ini memberikan pendidikan agama, maka ia dimasukkan dalam Departemen Agama. Dalam rangka konvergensi, Departemen Agama yang menganjurkan supaya pesantren tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah disusun secara klasikal, dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum disamping mata pelajaran agama. Sehingga murid madrasah tersebut mendapat pendidikan umum yang sama dengan murid di sekolah umum. Menurut rencana pemerintah, kurikulum yang diselenggarakan madrasah sepertiganya akan terdiri dari pelajaran agama, dan sisanya merupakan mata

pelajaran umum.<sup>23</sup>

Perkembangan madrasah pada masa Orde lama sejak awal kemerdekaan sangat identik dengan, peran Departemen Agama didirikan tanggal 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pengembangan madrasah secara spesifik masalah pendidikan agama. Tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama meliputi; *pertama*, memberikan pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir (swasta), *kedua*, memberikan pengetahuan umum di madrasah, dan *ketiga*, mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) serta Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).<sup>24</sup>

Dalam rangka upaya meningkatkan madrasah, maka pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk material dan bimbingan, untuk itu Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1952. Dicontumkan madrasah, ialah: Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran. Ketentuan ini madrasah terdiri dari:

a. Madrasah Rendah, sekarang namanya madrasah Ibtidaiyah

---

<sup>23</sup> Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasah sekolah Pendidikan Islam dalam kurun modern*, hlm. 96-97.

<sup>24</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, hlm. 123.

- b. Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama, sekarang disebut Madrasah Tsanawiyah.
- c. Madrasah Lanjutan Atas, disebut Madrasah Aliyah.<sup>25</sup>

Kebijakan pemerintah Orde Baru, bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde Lama madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah. Menghadapi kenyataan ini, maka langkah pertama dalam pembaharuan pendidikan madrasah melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi ditempuh dengan menegerikan sejumlah madrasah dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah, sehingga lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mengatur perumusan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>26</sup>

Kebijakan di sekitar Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 menggambar ketegangan yang cukup keras dalam hubungan madrasah; dan pendidikan nasional. Dalam konteks ini madrasah tidak saja diasingkan dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga terdapat indikasi kuat akan

---

<sup>25</sup> Haidar Putra Daulany, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 102.

<sup>26</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, hlm. 132.

dihapuskan. Reaksi umat Islam menuntut hak dan status yang lebih baik lagi bagi madrasah sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional sehingga kedudukan dan orientasinya sama dengan sekolah.<sup>27</sup>

Upaya membenahi madrasah terus digulirkan oleh Departemen Agama. Pada tahun 1975 telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri-Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975. Dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa: a) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, b) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas, c) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.<sup>28</sup> Namun konsekuensinya madrasah harus mengubah kurikulumnya dengan 70% pelajaran umum dan hanya 30% pelajaran agama.

SKB Tiga Menteri tersebut dapat dianggap sebagai modernisasi madrasah, tetapi mempunyai kelemahan dengan komposisi kurikulum seperti yang ditetapkan, penguasaan terhadap ilmu agama bagi lulusan madrasah menjadi berkurang. Hal ini dapat mendangkalkan penguasaan pengetahuan agama di masyarakat. Karena itu, banyak tokoh masyarakat dan ulama bereaksi keras dan menyatakan menolak SKB Tiga Menteri.<sup>29</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Bab III Pasal 4 ayat (3) disebutkan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 147-148.

<sup>28</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, hlm. 294.

<sup>29</sup> Nor Huda, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, hlm. 321.

bahwa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Berdasarkan diktum ini maka populerlah lembaga pendidikan madrasah itu sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam.<sup>30</sup>

Sejalan dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, madrasah harus menerapkan kurikulum nasional 1994 yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu Departemen Agama dengan bantuan para ahli pendidikan Islam berupaya memasukkan apa yang mereka sebut “nuansa Islam” dalam buku-buku teks dengan masing-masing mata pelajaran dalam kurikulum madrasah 1994. Selain kurikulum yang berlaku secara nasional untuk kegiatan intrakurikuler, diatur pula kurikulum yang bersifat lokal. Kurikulum lokal ini pada dasarnya ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan ketentuan berlaku dalam SK Menteri Agama RI Nomor 371, 372, 373 tahun 1993 tentang kurikulum MI, MTs dan MA sebagai berikut.<sup>31</sup>

“Madrasah dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas madrasah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Madrasah juga dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat”.

---

<sup>30</sup> Haidar Putra Daulany, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 103.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*, hlm. 66

Pada kurikulum 1994 guru diberi wewenang untuk improvisasi dengan kurikulum yang sudah disusun. Guru leluasa mengatur alokasi waktu dalam mengajarkan setiap pokok bahasan atau sub pokok bahasan sesuai dengan kebutuhan. Guru diberi wewenang dalam menentukan metode, penilaian, dan sarana pembelajaran, baik secara fisik dan mental (intelektual dan emosional) maupun sosial.

Perjuangan memasukkan pengajaran agama dalam sistem pendidikan nasional berhasil setelah diundangkannya UU Sidiknas No. 20 Tahun 2003 yang disahkan Presiden pada tanggal 8 Juli 2003. Undang-undang ini mengakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan umum berciri khas Islam, kejuruan, profesi, vokasi, dan khusus. Maka madrasah memuat seluruh mata pelajaran yang diajarkan sekolah, dan ditambah dengan mata pelajaran ciri keislamannya yang meliputi: a) Qur'an Hadits, b) Akidah Akhlak, c) Fiqih, d) Sejarah dan Peradaban Islam, e) Bahasa Arab, semua mata pelajaran ini digolongkan kepada program ini.<sup>32</sup> Mata pelajaran yang berciri khas agama Islam, mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, kepentingan agama, masyarakat, serta penguasaan pengetahuan bagi semua siswa.

Ditinjau dari segi historis dapat dilihat bahwa madrasah telah

---

<sup>32</sup> Haidar Putra Daulany, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 105.

mengalami perubahan-perubahan. Tahap awal madrasah lebih konsentrasi kepada pengajaran mata pelajaran agama. Kemudian setelah diberlakukannya SKB Tiga Menteri Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1989 serta UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan madrasah mengacu pada sistem pendidikan nasional, baik jenjang pendidikan maupun kurikulumnya.

Madrasah formal, sama halnya seperti sekolah namun yang membedakan status madrasah negeri dan madrasah swasta sebagai berikut:

#### 1. Madrasah Negeri

Madrasah negeri adalah madrasah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Negara. Masyarakat umumnya memandang bahwa madrasah negeri lebih unggul dari madrasah swasta, baik dari segi fasilitas maupun kualitas.<sup>33</sup>

Madrasahnegeri awalnya merupakan upaya Departemen Agama dalam menata dan membina madrasah. Dengan cara perubahan status menjadi negeri pada sejumlah madrasah swasta dan menjadikannya sebagai *pilot project* madrasah negeri dijadikan contoh bagi sekolah swasta agar menjadi madrasah bermutu dan profesional. Pendirian madrasah negeri merupakan pembinaan terhadap madrasah swasta.

Madrasah negeri pelaksanaannya diawasi langsung oleh kementerian agama, karena bertujuan sebagai contoh bagi madrasah swasta SDM dari pengajar maupun karyawan dari madrasah ini pun diseleksi sedemikian untuk

---

<sup>33</sup> Rusni Bil Makruf, "Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah Swasta", el Hikmah Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan Islam, 10. 1, (6. 2016), hlm. 52.

menjaga kualitas madrasah.<sup>34</sup> Fasilitas sarana dan prasarana mulai dari gedung bangunan serta perlengkapan operasional dan kebutuhan dari madrasah negeri diberi anggaran tersendiri oleh pemerintah demi terealisasinya madrasah yang memiliki mutu yang tinggi.

## 2. Madrasah Swasta

Madrasah Swasta adalah madrasah yang pengadaannya dilaksanakan oleh masyarakat dan dikelola oleh lembaga perorangan atau kelompok masyarakat. Madrasah swasta lahir dari kehendak rakyat, dikelola sendiri oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat. Madrasah swasta memiliki ciri ketulusan pada guru dan karyawannya dengan tujuan menegakkan agama Allah. Namun tidak diimbangi dengan keahlian, keterampilan yang memadai. Sehingga SDM dari madrasah swasta ini seringkali dianggap rendah.

Bukan hanya dari pengajar dan karyawannya saja, melainkan dari input siswa yang menjadi pembelajar di madrasah swasta ini sering kali hanya untuk memenuhi kuota yang ada atau juga semua diterima tanpa seleksi untuk menunjukkan eksistensi madrasah swasta yang memiliki siswa yang banyak. Kurikulum administrasi dan proses pembelajaran pada madrasah ini lebih sederhana dan tidak jarang juga perangkat pembelajaran hanya sekedar memenuhi untuk akreditasi atau pendataan sekolah namun tanpa

---

<sup>34</sup> Minnah el Widdah, *Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah*, hlm.31-32.

dilaksanakan. Sehingga proses pembelajaran pun terkesan asal dan hanya memenuhi jam pelajaran saja dan dianggap kurang berkualitas.

Madrasah swasta identik dengan fasilitas yang serba kurang. Beberapa sekolah swasta dirintis dengan menempati rumah pendirinya, kemudian menerima tanah wakaf, mendapat sumbangan dari masyarakat untuk membangun gedung dan akhirnya terwujud bangunan sederhana. Untuk mewujudkan kondisi ideal suatu madrasah membutuhkan perjuangan yang keras dengan bantuan dari masyarakat sekitar dan juga pengabdian dari guru dan karyawan.

Bagi madrasah swasta, Bantuan Operasional Sekolah merupakan catatan bersejarah. Pengelolaan madrasah swasta selama ini dilakukan secara mandiri. Madrasah swasta sudah terbiasa mencukupi kebutuhan operasional pendidikan dengan mencari dana sendiri. Jangankan berpikir mengembangkan program peningkatan mutu, untuk membayar rutin honor guru pun, kerap harus menunggak.<sup>35</sup>

### **C. Sejarah Madrasah di Sumatera Selatan**

Secara historis, pembentukan tradisi keilmuan dan pengajaran agama Islam di Sumatera Selatan terdapat tiga lembaga pendidikan utama yang berperan penting dalam proses transfer dan pemeliharaan ilmu-ilmu agama Islam yaitu rumah, langgar, dan masjid. Keberadaan lembaga pendidikan

---

<sup>35</sup> Rusni Bil Makruf, *"Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah Swasta"*, el Hikmah Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan Islam, 10. 1, (6. 2016), hlm. 56.

Islam tradisional ini nampaknya tidak hanya merupakan kekhasan wilayah Sumatera Selatan, tetapi mencerminkan kecenderungan umum di Nusantara.<sup>36</sup>

Masyarakat Sumatera Selatan pada masa kolonial Belanda, secara geografis dibagi dalam tiga daerah: Kota Palembang, daerah *Iliran* (pedesaan dibagian hilir sungai musi), daerah *Uluan* (pedesaan pedalaman dihulu sungai musi yang dibatasi oleh pegunungan). Penduduk yang mendiami *Iliran* atau *Uluan* terbagi kedalam beberapa *Afdeeling* dan *Onderafdeeling* (marga yang membawahi beberapa desa).<sup>37</sup> Namun, setelah Kesultanan Palembang runtuh, maka tidak ada lagi perbedaan antara *Iliran* dan *Uluan* karena semuanya berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Termasuk pendidikan seperti Sekolah desa, Sekolah Kelas II, Sekolah Sambungan (*Vervolgschool*), HIS, dan HCS dibeberapa daerah baik di Kota Palembang maupun desa-desa di *Iliran* dan *Uluan*.<sup>38</sup> Salah satu faktor yang mendorong masyarakat memasukkan anaknya ke sekolah pemerintah adalah adanya keinginan agar anaknya dapat menjadi pegawai pemerintahan Belanda.

Pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di rumah berbentuk pengajaran agama Islam pada tingkat yang paling dasar, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, cara-cara melakukan ibadah sholat dan

---

<sup>36</sup> Ismail, *Madrasah Dan Pergolakan Sosial Politik Di Keresidenan Palembang 1925-1942 Fenomena Historis Lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Selatan Pada Masa Kolonial Belanda*, hlm. 38.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

membaca ayat-ayat Al-qur'an yang yang dibaca dalam sholat. Mula-mula pengajaran ini dilakukan di rumah dalam lingkungan keluarga. Jika seorang anak dianggap sudah harus mendapatkan pelajaran yang lebih mendalam lagi, maka ia harus pergi ke rumah seorang guru atau Kiyai. Atau bagi keluarga tertentu dapat mendatangkan seorang guru atau Ulama untuk memberikan pelajaran agama Islam bagi anggota keluarga, kerabat, dan tetangga dekat.<sup>39</sup>

Lembaga Pendidikan tradisional langgar dan masjid, langgar adalah bangunan kecil tempat ibadah sholat berjama'ah tetapi tidak digunakan untuk sholat Jum'at karena hanya dapat menampung sejumlah kecil orang. Sementara masjid dapat menampung jama'ah sholat Jum'at lebih besar. Langgar atau masjid juga tempat diajarkannya materi pengajaran agama Islam elementer ditambah pengenalan huruf-huruf Arab (*Hijaiyah*). Disamping itu, masjid juga merupakan tempat dimana seorang anak melanjutkan pelajaran agama yang telah diperoleh di rumah. Meneruskan pada tingkat kitab mencakup pelajaran Bahasa Arab, Fikih, dan Tauhid, selanjutnya pada tingkat kedua pendalaman kitab ditambah dengan Tafsir, Hadits, Tasawuf, dan Hisab. Pengajian tingkat kedua ini diadakan di Masjid Agung Palembang oleh khatib imam dan khatib penghulu.<sup>40</sup>

Akan tetapi keberadaan sekolah ini nampaknya belum dapat

---

<sup>39</sup> Ismail, *Madrasah Dan Pergolakan Sosial Politik Di Keresidenan Palembang 1925-1942 Fenomena Historis Lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Selatan Pada Masa Kolonial Belanda*, hlm. 39.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 39.

memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Maka sebagian masyarakat kemudian berinisiatif mengusahakan berdirinya sekolah dengan sistem pendidikan sebagaimana halnya sekolah pemerintah. Sebagian masyarakat muslim juga mendirikan sekolah-sekolah partikelir Islam (lembaga pendidikan Islam formal dan klasikal dengan sistem dan metode seperti sekolah-sekolah Belanda).

Upaya pembaharuan pada awal abad ke-20 M, pada tahun 1907 telah didirikan Madrasah (Sekolah Arab) Al-Ihsan di Palembang oleh sekelompok pemuda Arab. Pada tahun 1914, di Kampung 13 Ulu Palembang didirikan Madrasah Arabiyah oleh kalangan keturunan Arab yakni keluarga Al-Munawwar. Menurut Peeters, sistem pendidikan dalam kedua madrasah ini masih model tradisional dengan materi yang tidak jauh berbeda dengan materi yang diberikan di langgar.<sup>41</sup> Lembaga pendidikan Islam berbentuk klasikal dan formal sebagaimana sistem sekolah pemerintah muncul pada tahun 1925 di Kota Palembang, berdirinya Madrasah Ahliyah Diniyah di Kampung Sekanak, di luar Kota Palembang (di pedesaan wilayah Iliran Palembang) bernama Madrasah Islamiyah Tanjung Raja *Onderafdeeling* Komering Ilir, dalam disertasi Peeters adalah Madrasah Islamiyah sekayu (1926), Sekolah Muhammadiyah di Sekayu, Madrasah Diniyah Tebing Tinggi,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

Madrasah Arabiyah Pagar Alam, Madrasah Ibtidaiyah Sakatiga.<sup>42</sup>

Dengan demikian, asal-usul madrasah sebagai transformasi pengajaran agama di rumah atau langgar menjadi lembaga pendidikan madrasah baik di Kota Palembang, daerah *Iliran* dan *Uluan* pada masa kolonial Belanda merupakan kesadaran masyarakat Muslim bahwa peran pendidikan penting untuk mencerdaskan umat Islam, sementara pemerintah Belanda belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98.